

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan awal terbentuknya sebuah keluarga kecil. Perkawinan diawali dengan adanya komitmen antara pria dan wanita untuk hidup bersama. Keduanya mengikat janji nikah yaitu suatu pernyataan dihadapan wali dan saksi sebagai persetujuan menuju ikatan yang sah dan diakui agama serta masyarakat sekitar. Menurut Undang-Undang no.1 Tahun 1974 (pasal 1) perkawinan ialah ikatan lahir batin oleh seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (Kertamuda, 2009).

Suatu perkawinan terdiri dari dua individu, meliputi pria sebagai suami dan wanita sebagai istri yang keduanya memiliki peran, keunikan dan adanya kemungkinan bahwa tujuan kedua individu itu tidak sama. Menurut Kertamuda (2009), suami istri adalah dua insan yang berbeda hampir dalam segala hal. Suami istri memiliki pengalaman-pengalaman, memori, dan cara bertingkah laku masa lalu yang akan mempengaruhi cara individu memandang dan menyelesaikan masalah (Sadarjoen, 2005).

Perkawinan merupakan ikatan yang berlangsung untuk selamanya sehingga hubungan suami istri perlu dipertahankan dan dipelihara. Dalam perkawinan, dua individu menjalani kehidupan bersama dimana seharusnya dapat saling memberi dukungan. Namun, dalam kehidupan perkawinan tidak selamanya

berjalan dengan lancar dan sesuai harapan. Pasangan suami istri akan menghadapi berbagai masalah dalam memelihara hubungan. Walaupun pasangan suami istri sudah saling mengenal sebelumnya, tetapi perbedaan-perbedaan dapat menjadi sumber kekesalan, pertengkaran, dan menimbulkan masalah. Masalah yang timbul sudah tentu dapat menjadi penyebab datangnya konflik (Kertamuda, 2009).

Konflik menurut Cummings (dalam Wahyudi, 2006) didefinisikan sebagai suatu proses interaksi sosial di mana dua orang atau lebih, atau dua kelompok atau lebih, berbeda atau bertentangan dalam pendapat atau tujuan mereka. Anorogo dan Ninik, (1990) mengungkapkan konflik dapat terjadi karena adanya perbedaan pendapat, dimana masing-masing pihak merasa dirinyalah yang paling benar. Salah paham diantara keduanya, misalnya tindakan suami mungkin tujuannya baik, tetapi oleh pihak istri tindakan itu dianggap merugikan. Hal-hal tersebut dapat menimbulkan rasa yang kurang enak, ketegangan, merasa dirugikan, menimbulkan rasa kurang simpati dalam hubungan suami istri.

McGonagle, Kessler, dan Schilling (dalam Taylor, 2009) menyatakan bahwa pada pasangan yang sudah menikah, konflik merupakan keadaan yang sudah biasa terjadi. Penelitian yang dilakukan oleh Gurin, Geroff dan Feld dalam Sears, Freedman, Peplau (1999), yang menyimpulkan bahwa konflik akan senantiasa terjadi dalam kehidupan perkawinan. Hal tersebut ditunjukkan oleh hasil penelitiannya dimana 45% orang yang sudah menikah mengatakan bahwa dalam kehidupan bersama akan selalu muncul berbagai masalah, dan 32% pasangan menilai perkawinan mereka sangat membahagiakan melaporkan bahwa mereka juga pernah mengalami pertentangan.

Dalam perkawinan tidak akan terlepas dari konflik. Maka dari itu calon pasangan suami istri perlu memiliki kesiapan sebelum membina perkawinan. Hal ini berkaitan dengan salah satu tugas Kantor Urusan Agama yaitu berkaitan dengan penyuluhan perkawinan. Suatu usaha yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan kegiatan pembinaan mental bagi calon pasangan suami istri maupun pasangan suami istri yang dianggap sudah dewasa terlebih bagi pasangan yang masih belum dewasa. Tugas ini terkait dengan pemberian penyuluhan pra perkawinan maupun pasca perkawinan. Tujuan penyuluhan adalah agar calon pasangan pengantin yang akan menuju ke pelaminan menjadi lebih mawas diri dan memiliki bekal menuju jenjang rumah tangga kelak (Kappara, 2012). Suami istri mengetahui peran masing-masing, perilaku yang patut dilakukan dan tidak patut dilakukan pada pasangan serta aturan hukum perdata maupun agama dalam perkawinan untuk mencegah maraknya perceraian yang terjadi dalam perkawinan.

Berbagai hal akan mewarnai kehidupan perkawinan, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Untuk itu, peran konselor perkawinan juga sangat dibutuhkan. Ada beberapa hal yang melatarbelakangi dibutuhkannya konseling dan bimbingan perkawinan (Walgito, 2002) yaitu pertama, masalah perbedaan individual. Bagi individu yang tidak mampu untuk memecahkan konflik maka ia membutuhkan orang lain atau konselor dalam mencari solusi untuk permasalahannya. Kedua, masalah kebutuhan individu, terkadang individu kurang mampu dalam mencapai kebutuhan dan tujuan yang ia miliki. Konselor membantu untuk mengarahkan individu agar tujuan tercapai. Ketiga, masalah perkembangan individu dimana dalam hal ini adanya

perkembangan individu akan menimbulkan perbedaan-perbedaan tanpa individu mengerti, tentu hal ini membuat kesulitan dalam dirinya. Keempat, masalah perbedaan sosiokultural dimana pada individu yang menikah sudah tentu masing-masing memiliki latar belakang yang berbeda. Jika individu kurang mampu beradaptasi, maka dibutuhkan bantuan konselor.

Dh (23 tahun) seorang ibu beranak satu ini mengatakan sebagai berikut :

"Aku pernah pas neng kantor, ono kancaku seng ra sopan neng aku. Dek'e ki jawil aku tapi ra tak kandakno bojoku. Aku ngomong neng kancaku kuwi yen dibaleni aku lapor kepalaku karo bojoku. Tapi nganti seprene ki aku wedi areg crita bojoku, mengko ndak bojoku nesu. Makane aku milih crita neng kancaku wae."

Sebaliknya, Dw (35 tahun) seorang pegawai koperasi mengatakan :

"Aku mbak yen ono masalah karo Mas Ng ki ra tau mbak aku karo Mas Ng kok ngomongne neng ngarepe cah-cah ki ra tau. Aku karo Mas Ng nyat'e wis sepakat kok yen ono masalah ojo nganti anak-anake dewe weruh. Mesti lehku ngomongno neng jero kamar tak tutup lawange. Mbok ngrembug utang, po masalah liyane pokoke ojo nganti anak-anak weruh."

Demikian pula dengan St (48 tahun) seorang guru MTS mengatakan :

"Kalau saya ada salahpahaman apa masalah gimana gitu, saya mesti cerita sama suami, ngomongin masalah itu. Saya sama suami dimana aja bisa ngomongin masalah apa aja mbak. Kadang ya saat masak, dalam perjalanan sama suami, kadang waktu suami nyuci motor didepan gitu saya sambil nyiram tanaman. Dari gitu kan saya sama suami omongin terus bisa ketemu solusi gitu lho mbak."

Penyelesaian konflik di setiap keluarga berbeda-beda baik secara positif maupun negatif. Penyelesaian konflik secara positif dengan adanya keterbukaan diri istri terhadap suami, sedangkan penyelesaian konflik secara negatif yang mana istri cenderung menutupi masalah dari suami.

Ditinjau dari intensitas kecenderungan laki-laki dan perempuan untuk terlibat dalam suatu lingkaran konflik perkawinan, maka perempuan lebih rentan untuk mengalami konflik (Dewi dan Basti, 2008). Hal ini disebabkan perempuan ketika telah menikah, mereka menyerahkan diri secara total pada pasangannya. Hal ini mendorong mereka untuk menyerahkan segenap perhatiannya untuk menjaga dan mempertahankan kehidupan perkawinannya. Sehingga perempuan lebih didominasi oleh prasangka dan kecurigaan yang pada akhirnya dapat memicu terjadinya konflik ketika ada hal yang dianggap mengancam perkawinannya.

Kartono (1992) menyatakan bahwa perempuan lebih banyak menunjukkan tanda-tanda emosional. Hal ini terlihat bahwa perempuan lebih cepat bereaksi dengan hati yang penuh ketegangan, lebih cepat berkecil hati, bingung, takut dan cemas. Perempuan lebih dipengaruhi oleh kehidupan perasaannya, yang didorong sentimen-sentimen yang kuat, yang pada akhirnya membuat dugaan dan perhitungan yang mereka ambil menjadi keliru dan menimbulkan konflik tersendiri.

Kemampuan mengelola konflik dalam perkawinan adalah kecakapan dan kesiapan suami istri dalam mengendalikan dan mencari cara penyelesaian masalah dalam perkawinannya. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi

kemampuan mengelola konflik yaitu asumsi mengenai konflik, persepsi mengenai penyebab konflik, ekspektasi atas reaksi lawan konflik, kekuasaan yang dimiliki, pengalaman menghadapi situasi konflik, sumber yang dimiliki, jenis kelamin, kecerdasan emosional, budaya organisasi, situasi dan posisi dalam konflik, kepribadian, keterampilan berkomunikasi, dan pola komunikasi termasuk didalamnya keterbukaan diri.

Beberapa aspek adanya keharmonisan dalam rumah tangga menurut Stinnet dan De Frain (dalam Piter, 2010) yaitu mempunyai komunikasi yang baik antar anggota keluarga yang ditandai dengan adanya *self disclosure* atau keterbukaan diri dan kualitas serta kuantitas konflik yang minim. Hal ini berarti apabila istri bersikap terbuka pada suami ataupun sebaliknya, membicarakan segala permasalahan sehingga menemukan solusinya, maka istri tersebut dikatakan memiliki kemampuan dalam mengelola konflik.

Self disclosure merupakan istilah asing yang berarti keterbukaan diri atau pengungkapan diri. Keterbukaan diri antar pasangan diperlukan dalam setiap individu yang menikah. Menurut Morton (dalam Dayakisni dan Hudaniah, 2003) keterbukaan diri merupakan kegiatan membagi perasaan dan informasi yang akrab dengan orang lain. Jika seseorang berbohong atau menyimpan sesuatu, maka masalahnya akan semakin panjang dan akan menimbulkan konflik yang baru pula.

Pengakuan Tn (45 tahun) seorang ibu rumah tangga sebagai berikut :

“Aku mbak..mbak.ameh ngomong Mas Ny ki wedi. Biyen aku diweneh’i duwit piro-piro karo Mas Ny ki tak tompo karo ngomong maturuwun ya mas. Jaman semono yo mbak diwenehi duwit 1,2 kan yo lumayan. Saiki bareng K karo N ki

wis SMA trus A neng SDIT iki aku soyo montang manting. Lha piye mbak duwit sakmono isih dinggo mangan karo ragat cah sekolah. Aku ki meh njaluk meneh ra wani karo Mas Ny, soale aku yo ngrumangsani ra iso golek. Jaluk tambah meneh yo piye rasane yuk'an. Trus ndelalah kon ganteni dodolan Budhe Tm neng pasar iki. Alhamdulillah ono tambahan nggo ragat."

Seperti cerita yang dipaparkan oleh S (36 tahun) berikut:

"Penyebab perceraian saya dulu karena saya kecewa mba sama suami. Tiap kali mendapat pekerjaan, ia selalu tidak betah. Dengan alasan itu ia lalu mengundurkan diri kemudian menganggur. Beberapa kali seperti itu sampai berulang kali saya beri masukan ke dia tapi mantan suami saya tidak mendengarkan. Keluarga besar saya selalu menyalahkan saya karena kebiasaannya seperti itu dan semakin memojokkan saya karena dulu memilih dia menjadi suami. Keluarga saya juga selalu mengejek mantan suami saya itu. Akhirnya saya memilih untuk bercerai saja karena saya gak kuat mba ditekan terus dan saya merasa suami juga sudah tidak mau perduli lagi."

Perkara konflik yang terjadi dalam perkawinan bukan penghalang untuk mencapai rumah tangga yang tenteram dan harmonis. Namun hal ini juga tidak dapat diabaikan begitu saja karena jika tidak terselesaikan dengan baik maka akan merugikan pihak-pihak yang terlibat. Seperti kasus di atas ketika pada akhirnya terjadi pengajuan perceraian baik dari suami maupun istri, sesungguhnya masih ada hal yang dapat dilakukan sebagai bentuk usaha perdamaian adalah dilakukannya mediasi. Perkara mediasi ini dilakukan oleh pihak Pengadilan Agama. Mediasi di Pengadilan Agama adalah suatu proses usaha perdamaian

antara suami dan istri yang telah mengajukan gugatan cerai, dimana mediasi ini dijembatani oleh seorang Hakim yg ditunjuk di Pengadilan Agama (Dedy, 2012). Dalam proses mediasi yang dibutuhkan adalah kemauan dari suami istri untuk membuka pikiran dan hati, mengungkapkan perasaan dan pikiran dibantu oleh Hakim untuk mencari solusi sehingga perkawinan masih dapat diselamatkan.

Menurut Sadarjoen (2005) bahwa istri yang melakukan keterbukaan diri, akan meningkatkan keakraban dengan suami. Hubungan yang akrab dan saling mempercayai akan menambah keterbukaan diri istri terhadap suami begitu juga sebaliknya. Dengan begitu diharapkan konflik yang terjadi akan terkelola dengan baik.

Menurut Supratiknya (1995), pasangan suami istri dapat saling mengenal dan melengkapi melalui proses keterbukaan diri. Informasi yang didapat dalam keterbukaan diri istri akan menghasilkan pemahaman bagi suami. Suami akan mengetahui, memahami dan memperkirakan perilaku istri dan perasaan istri dalam situasi tertentu sehingga akan memperkecil kesalahpahaman.

Hasil studi menunjukkan bahwa terdapat kontribusi keterbukaan diri secara signifikan terhadap kepuasan perkawinan pria dewasa awal, dan kontribusi tersebut sebesar 56.9%, sedangkan 43.1% lainnya kemungkinan dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti equalitarian, seks, kehidupan sosial, tempat tinggal dan penghasilan (Rini dan Retnaningsih, 2008).

Pada kenyataannya, tidak semua istri mampu mengelola konflik dalam perkawinan dengan baik yang salah satunya disebabkan oleh terhambatnya komunikasi dengan suami sehingga cenderung tertutup. Salah satu kunci utama

komunikasi adalah keterbukaan diri. Namun, dalam kehidupan sehari-hari perempuan lebih banyak melakukan keterbukaan diri dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini dikarenakan laki-laki tidak dapat mengartikulasikan perasaan dan masalahnya secara verbal karena merasa kurang nyaman (Rini dan Retnaningsih, 2008). Vera dan Betz (dalam Rini dan Retnaningsih, 2008) menemukan bahwa perempuan lebih signifikan dalam melakukan keterbukaan diri secara emosional dibandingkan laki-laki.

Menurut Dewi & Basti (2008), bahwa istri memecahkan masalah dari sudut pandang yang berbeda dari perspektif suami. Bagi sebagian besar istri, ingin cepat-cepat menyelesaikan masalah yang meliputi banyak hal. Istri merasa perlu membicarakan segala sesuatunya secara menyeluruh. Namun suami memandang hal yang dipermasalahkan istri bukan menjadi masalah baginya. Maka dari itu diperlukan pemahaman suami mengenai keinginan istri begitu pula pemahaman istri terhadap suami.

Suami akan dapat memahami istri apabila ia mampu mengungkapkan perasaan dan keinginan pada suami. Perbedaan pandangan antara istri dengan suaminya dapat dicari solusinya dengan jalan istri mampu membicarakan semua masalah dengan baik pada suami dan mampu mengungkapkan perasaan, pikiran dan sikapnya kepada suami. Dengan begitu segala kesalahpahaman dapat direda dan konflik terkelola dengan baik. Menurut Supraktiknya (1995), bahwa pengelolaan konflik yang baik, akan membawa pada perkawinan yang harmonis dan dari proses tersebut akan mendewasakan masing-masing pribadi. Pengelolaan

konflik secara sehat dan baik dapat digunakan untuk mempertahankan kualitas hubungan dalam perkawinan.

Dari uraian di atas maka penulis mengajukan rumusan masalah dari penelitian ini yaitu: Apakah ada hubungan antara keterbukaan diri istri dengan kemampuan mengelola konflik dalam perkawinan. Untuk mengkaji lebih lanjut rumusan masalah di atas maka penulis mengadakan penelitian dengan judul “Hubungan antara Keterbukaan Diri Istri dengan Kemampuan Mengelola Konflik dalam Perkawinan”.

B. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam penelitian ini, maka tujuan yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui :

1. Hubungan antara keterbukaan diri istri dengan kemampuan mengelola konflik dalam perkawinan.
2. Tingkat keterbukaan diri istri.
3. Tingkat kemampuan mengelola konflik istri dalam perkawinan.
4. Sumbangan efektif keterbukaan diri istri terhadap kemampuan mengelola konflik dalam perkawinan.

C. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan akan diperoleh informasi-informasi yang bermanfaat bagi:

1. Konselor perkawinan, diharapkan agar dalam konseling perkawinan dapat mempertimbangkan pentingnya keterbukaan diri karena dapat berpengaruh pada kemampuan mengelola konflik dalam perkawinan.
2. Kantor Urusan Agama, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan penyuluhan kepada calon pasangan suami istri maupun pasangan suami istri akan pentingnya keterbukaan diri istri untuk mengelola konflik dalam perkawinan.
3. Pengadilan Agama, diharapkan dapat digunakan sebagai materi mediasi bagi pasangan suami istri yang memiliki niat bercerai sebagai usaha perdamaian.
4. Peneliti selanjutnya. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam pengembangan penelitian lebih lanjut.